

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah dalam Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Perspektif Teori *Civic Engagement* dan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Evi Wiyanti¹

¹Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan, Lamongan, Indonesia

Email: 1ewiyanti@unisla.ac.id

Abstract

This study aims to analyze educational policy, the implementation process, and their impact on students' civic participation at Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan from the perspectives of civic engagement and the concept of amar ma'ruf nahi munkar. This research employs a qualitative approach with a case study design and the CIPP evaluation model. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using an interactive model. The findings show that, in terms of policy, the madrasah has established normative policies based on its vision and mission that support civic engagement; however, they remain implicit and not yet operationally structured, reflecting the stage of amar ma'ruf bil qalb (value awareness). In the implementation process, learning activities have adopted dialogical and contextual approaches through discussions of social issues, placing students in the category of participatory citizens. This stage corresponds to amar ma'ruf bil lisan, where students develop critical awareness and argumentation skills. However, the implementation remains uneven, predominantly theoretical, and lacks real-life experiences and external collaboration. In terms of implementation and impact, various practices have improved students' understanding and awareness. However, involvement in concrete actions remains low and incidental, indicating that the justice-oriented citizen level has not been achieved and has not yet reached the stage of bil yad. Therefore, the implementation of civic engagement remains partial and has not fully fostered active and sustainable civic participation.

Keywords: civic engagement; educational policy; policy implementation; civic participation; madrasah aliyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan, proses implementasi, serta dampaknya terhadap partisipasi kewarganegaraan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dalam perspektif *civic engagement* dan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan model evaluatif CIPP. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kebijakan, madrasah telah memiliki kebijakan normatif berbasis visi-misi yang mendukung *civic engagement*, namun masih bersifat implisit dan belum terstruktur secara operasional, sehingga berada pada tahap *amar ma'ruf bil qalb* (kesadaran nilai). Pada aspek proses implementasi, pembelajaran telah mengarah pada pendekatan dialogis dan kontekstual melalui diskusi isu sosial, yang menempatkan siswa pada kategori *participatory citizen*. Tahap ini sejalan dengan *amar ma'ruf bil lisan*, yaitu partisipasi melalui kesadaran kritis dan kemampuan berargumentasi. Namun, pelaksanaannya belum merata, masih dominan teoretis, serta minim pengalaman nyata dan kolaborasi eksternal. Pada aspek implementasi dan dampak, berbagai praktik telah meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa. Namun, keterlibatan dalam tindakan nyata masih rendah dan bersifat insidental, sehingga belum mencapai *justice-oriented citizen* dan dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar belum sampai pada tahap *bil yad*. Dengan demikian, implementasi *civic engagement* masih parsial dan belum membentuk partisipasi kewarganegaraan yang aktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *civic engagement*; kebijakan pendidikan islam; implementasi kebijakan; partisipasi kewarganegaraan; madrasah aliyah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Widagdo, 2025). Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah meningkatnya partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) peserta didik (Argara Pasaribu et al., 2025), baik dalam konteks sekolah maupun kehidupan sosial yang lebih luas (Yuli Astuti Hasanah et al.,

2025). Namun demikian, berbagai fenomena menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kewarganegaraan siswa di Indonesia masih tergolong rendah.

Secara nasional, berbagai laporan pendidikan dan kepemudaan menunjukkan bahwa kurang dari 40% siswa aktif terlibat dalam kegiatan organisasi sekolah seperti OSIS, pramuka, atau kegiatan sosial kemasyarakatan (Ani & Rosidin, 2025). Partisipasi dalam kegiatan berbasis kepedulian sosial seperti bakti sosial, forum diskusi, maupun kegiatan advokasi siswa bahkan berada pada kisaran 25–35% (Pebiani et al., 2025). Selain itu, keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah juga masih terbatas (Handoko et al., 2025), dengan sebagian besar siswa berperan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang aktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan realitas implementasinya di lapangan.

Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan karakter kewarganegaraan (Saputro & Muslimah, 2025). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan ruang partisipatif bagi siswa (Novantika et al., 2026), pendekatan pembelajaran yang masih didominasi oleh metode konvensional (*teacher-centered*) (Shandy & Juniantoro, 2021), serta belum optimalnya internalisasi kebijakan ke dalam kegiatan pembelajaran maupun budaya sekolah.

Dalam perspektif teori *civic engagement*, partisipasi kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan formal dalam organisasi, tetapi juga mencakup kesadaran kritis, kepedulian sosial, serta keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sosial (Rachman & Hosnan, 2025). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mendorong pengalaman partisipatif yang nyata bagi siswa.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai beberapa hal diantaranya yaitu mengenai bentuk kebijakan pendidikan di Madrasah Aliyah dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa dalam perspektif Civic Engagement dan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kemudian proses, Bentuk Implementasi dan hasil atau dampak implementasi kebijakan Fokus ini penting karena selama ini kajian mengenai kebijakan pendidikan seringkali berhenti pada tataran konseptual atau evaluatif secara umum (Yuli Astuti Hasanah et al., 2025), tanpa menguraikan secara mendalam proses implementasi dan dampaknya secara holistik.

Lebih lanjut, terdapat *research gap* yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam aspek kognitif, penguatan karakter atau nilai moral siswa secara umum, serta evaluasi program sekolah tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan teori *civic engagement*. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif *civic engagement* di lingkungan Madrasah Aliyah masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengintegrasikan analisis antara dimensi kebijakan (*policy*), proses implementasi (*process*), praktik nyata (*practice*), dan hasil (*outcome*) dalam satu kerangka kajian yang utuh.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis kebijakan pendidikan dengan teori *civic engagement*, serta memfokuskan pada konteks Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan

yang memiliki karakteristik khas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif dan kontekstual dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa.

B. METODE

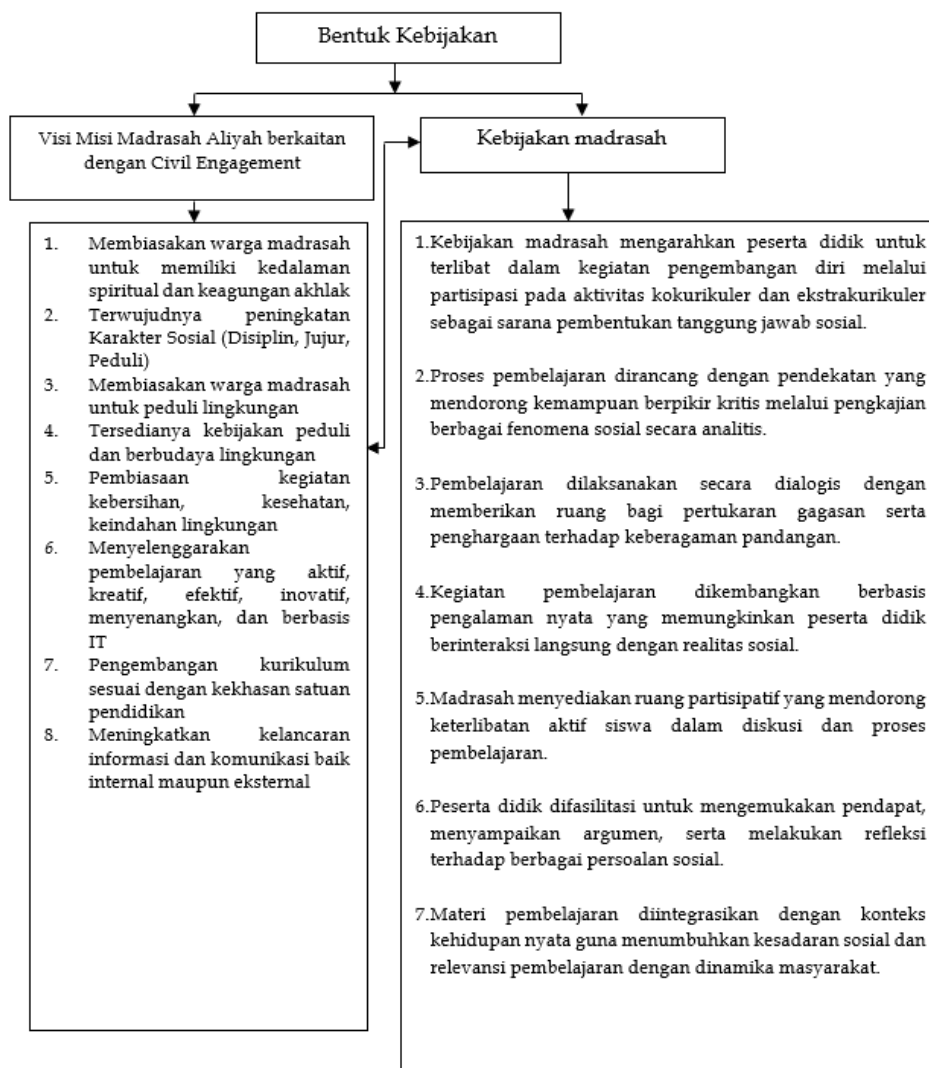
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan evaluatif (Bado, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa, tidak hanya pada tataran konsep, tetapi juga pada proses pelaksanaan serta hasil yang dihasilkan di lingkungan Madrasah Aliyah. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan holistik (Harahap, 2020), sedangkan pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan secara sistematis (Rijal Fadli, 2021). Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (Nabila & Nadlir, 2025). Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan.

Dalam penelitian ini, komponen *context* digunakan untuk menganalisis latar belakang dan tujuan kebijakan pendidikan terkait partisipasi kewarganegaraan siswa (Nasir et al., 2025). Komponen *input* digunakan untuk mengkaji sumber daya, strategi, serta perangkat kebijakan yang digunakan (Rahmat & Ambiyar, 2025). Komponen *process* berfokus pada pelaksanaan kebijakan dalam praktik pembelajaran dan kegiatan sekolah. Sementara itu, komponen *product* digunakan untuk menilai hasil atau dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan partisipasi kewarganegaraan siswa berdasarkan perspektif *civic engagement*. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan di madrasah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri atas kepala madrasah (1 orang), wakil kepala bidang kesiswaan (1 orang), guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2 orang), guru Pendidikan Agama Islam (2 orang), pembina OSIS/pramuka (2 orang), serta siswa yang aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial (4 orang). Jumlah ini dianggap memadai untuk memperoleh data yang mendalam dan beragam terkait implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (Sundari et al., 2024), observasi partisipatif, dokumentasi (Nilamsari, 2014). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik partisipasi kewarganegaraan siswa dalam kegiatan sekolah (Hasanah, 2016). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen kebijakan, program kerja, serta arsip kegiatan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa, sekaligus mengevaluasi keberhasilannya berdasarkan perspektif teori *civic engagement*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic Engagement Dan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar



Tabel 1. Bentuk Kebijakan Pendidikan secara Institusional

Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk kebijakan pendidikan di Madrasah Aliyah dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa menunjukkan adanya dua konstruksi utama, yaitu (1) kebijakan normatif berbasis visi–misi dan (2) kebijakan operasional dalam praktik pembelajaran (Akbar et al., 2025). Secara konseptual, kedua dimensi ini telah mengarah pada pengembangan *civic engagement*, namun jika dianalisis lebih dalam menggunakan perspektif teori kebijakan dan pendidikan Islam, ditemukan bahwa implementasinya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai dimensi transformatif.

Pada level normatif, visi–misi madrasah menekankan pembentukan karakter religius, sosial, dan kepedulian lingkungan (Dokumen Visi Misi Madrasah, 2024). Hal ini menunjukkan adanya pendekatan *value-based education policy*, yang sejalan dengan pemikiran John Dewey bahwa pendidikan demokratis harus berangkat dari internalisasi nilai melalui

pengalaman sosial (Jamil et al., 2025) (Arifin, 2020). Dalam perspektif kebijakan, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III yang menekankan pentingnya kejelasan formulasi kebijakan (Doni et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai *civic engagement* telah hadir dalam visi–misi, kebijakan tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam program yang operasional, sehingga berhenti pada tataran normatif.

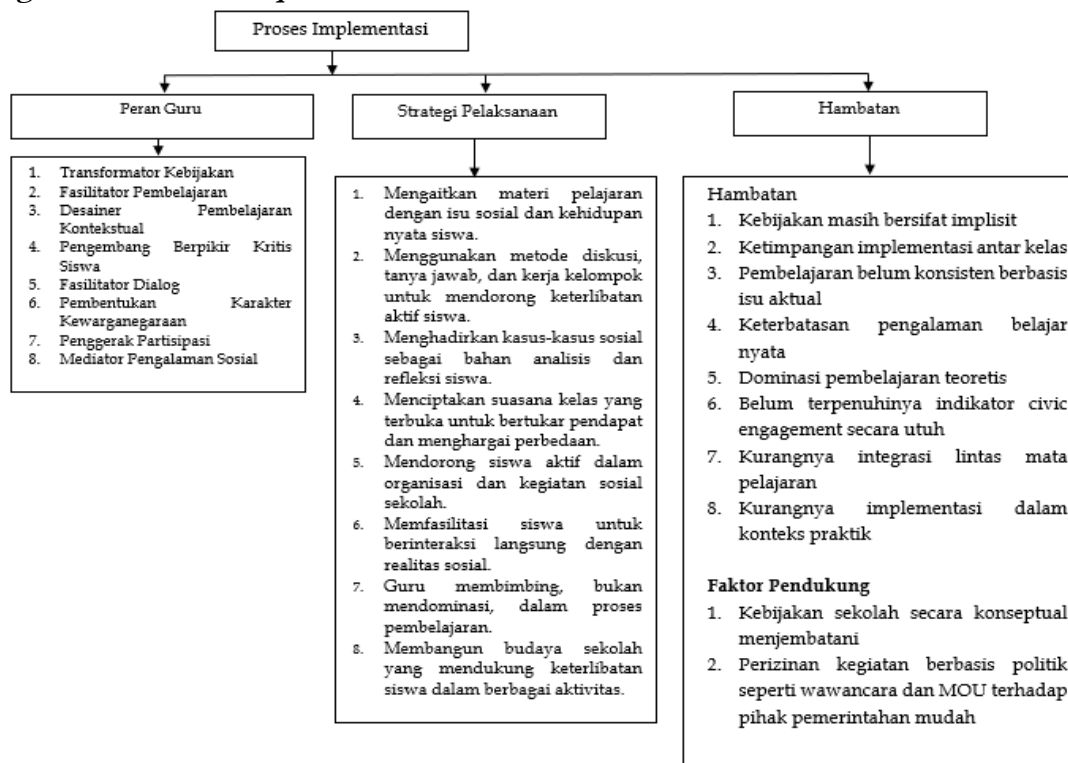
Jika dikaitkan dengan konsep *amar ma'ruf nabi munkar*, kondisi ini merepresentasikan tahap *bil qalb* (kesadaran nilai) (Iskandar et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, pendidikan Islam seringkali berhenti pada internalisasi nilai moral tanpa mendorong keterlibatan sosial nyata (Anam & , 2024). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa *amar ma'ruf nabi munkar* merupakan *fardhu kifayah sosial* yang harus dilembagakan secara sistemik (Syakdiah, 2025), bukan sekadar nilai individual. Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa kebijakan madrasah telah memiliki basis nilai yang kuat, namun belum berkembang menjadi mekanisme kelembagaan yang mendorong partisipasi aktif siswa.

Pada level operasional, kebijakan madrasah telah diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang mendorong diskusi, argumentasi, dan analisis isu sosial (Sulaiman et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan teori *experiential learning* dari David Kolb serta *problem-based learning* (Darwis et al., 2025) yang menekankan pembelajaran berbasis masalah nyata (Kolb, 1984). Selain itu, praktik dialogis yang diterapkan mencerminkan pedagogi kritis dari Paulo Freire yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (*critical consciousness*) (Datunsolang, 2017). (Mahur et al., 2019)

Dalam kerangka *civic engagement*, praktik ini telah mendorong terbentuknya siswa sebagai *participatory citizen*, sebagaimana dikemukakan oleh Joel Westheimer dan Joseph Kahne (Ali, 2020). Namun, jika dikaitkan dengan konsep *amar ma'ruf nabi munkar*, praktik ini baru mencapai tahap *bil lisan* (diskursif), yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, berdialog, dan mengkritisi isu sosial (Asror et al., 2025). Hal ini juga selaras dengan teori deliberatif dari Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang diskusi dalam pembentukan kesadaran publik (Rizqian, 2025). Meskipun demikian, berdasarkan analisis menggunakan perspektif Robert Putnam, partisipasi yang terbentuk masih bersifat internal dan belum berkembang menjadi keterlibatan sosial di masyarakat luas (Novak et al., 2004). Kondisi ini menunjukkan adanya *policy-practice gap* (Jacoby & Ehrlich, 2009), yaitu kesenjangan antara desain kebijakan yang progresif dengan implementasi yang belum optimal.

Jika dianalisis lebih lanjut dalam kerangka *amar ma'ruf nabi munkar*, madrasah belum sepenuhnya mencapai tahap *bil yad* (aksi nyata). Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Amien Rais, *amar ma'ruf nabi munkar* mencakup tiga dimensi: kesadaran (*bil qalb*), advokasi (*bil lisan*), dan tindakan nyata (*bil yad*) (Murjoko, 2025), yang dalam *civic engagement* setara dengan *justice oriented citizen* (Westheimer & Kahne, 2004a). Hal ini juga diperkuat oleh Khaled Abou El Fadl yang menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, *amar ma'ruf nabi munkar* memiliki dimensi kelembagaan melalui sistem *hisbah*, yang merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kehidupan sosial (Hasibuan et al., 2024). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara operasional dalam bentuk program sosial yang terstruktur.

Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic Engagement Dan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar



Tabel 2. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan

Temuan menunjukkan bahwa guru menjalankan berbagai peran strategis, mulai dari transformator kebijakan hingga mediator pengalaman sosial (Rizal, 2025). Secara teoretis, hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menolak model *banking education* dan menekankan bahwa guru harus menjadi fasilitator dialog yang membangun kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial (Mahur et al., 2019). Peran guru dalam memfasilitasi diskusi, mendorong argumentasi, dan tidak mendominasi pembelajaran menunjukkan bahwa praktik pendidikan di madrasah sudah bergerak menuju model dialogis tersebut (Fahmi et al., 2021).

Lebih lanjut, peran guru sebagai transformator kebijakan sejalan dengan konsep *transformative intellectual* dari Henry Giroux (Imama et al., 2025). Dalam perspektif ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi menerjemahkan kebijakan abstrak menjadi praktik pembelajaran yang bermakna (Seyyedi, 2025). Namun, temuan mengenai ketimpangan implementasi antar kelas menunjukkan bahwa peran ini masih bergantung pada kapasitas individu guru, bukan pada sistem yang terstandar. Artinya, secara struktural, implementasi belum stabil.

Dalam perspektif Islam, peran guru ini mencerminkan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, pelaksana *amar ma'ruf* harus memiliki ilmu, kesadaran moral, dan kemampuan bertindak. Ketiga aspek ini terlihat dalam peran guru sebagai pengembang berpikir kritis (Munawir et al., 2023), pembentuk karakter (Sunita, 2023), dan penggerak partisipasi (Hamdi Abdillah, LC., 2025). Dengan demikian, guru di madrasah dapat diposisikan sebagai agen *amar ma'ruf bil lisan*, yaitu membimbing siswa melalui dialog dan kesadaran sosial.

Strategi pelaksanaan yang ditemukan menunjukkan orientasi pada pembelajaran aktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman (Patria et al., 2025). Secara teoretis, hal ini sangat relevan dengan model *experiential learning* dari David Kolb, di mana pembelajaran idealnya melalui siklus pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan aksi (Kolb, 1984). Dalam praktik di madrasah, siklus ini sudah berjalan pada tahap awal siswa diajak menganalisis isu sosial dan berdiskusi, namun dalam hal ini belum optimal pada tahap aksi nyata.

Selain itu, strategi diskusi, kerja kelompok, dan analisis isu sosial mencerminkan pendekatan *proble -based learning* yang mendorong siswa berpikir kritis terhadap realitas (Nasrullah et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh teori pedagogi kritis Paulo Freire yang menekankan pentingnya *critical consciousness* (Freire, 2005). Siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mulai menyadari permasalahan sosial di sekitarnya.

Dalam kerangka *civic engagement*, strategi ini telah mendorong terbentuknya tipe warga *participatory citizen* sebagaimana dikemukakan oleh Joel Westheimer dan Joseph Kahne (Westheimer & Kahne, 2004). Namun, belum sepenuhnya mencapai *justice-oriented citizen* karena keterlibatan siswa masih terbatas di lingkungan sekolah (Westheimer & Kahne, 2004). Jika dikaitkan dengan *amar ma'ruf nabi munkar*, strategi ini berada pada tahap bil lisan, yaitu partisipasi melalui diskusi, argumentasi, dan kesadaran kritis. Hal ini juga sejalan dengan teori deliberatif dari Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang dialog sebagai dasar demokrasi (Rizqian, 2025). Dengan demikian, madrasah telah berhasil menciptakan ruang publik mini di dalam kelas, namun belum memperluasnya ke masyarakat.

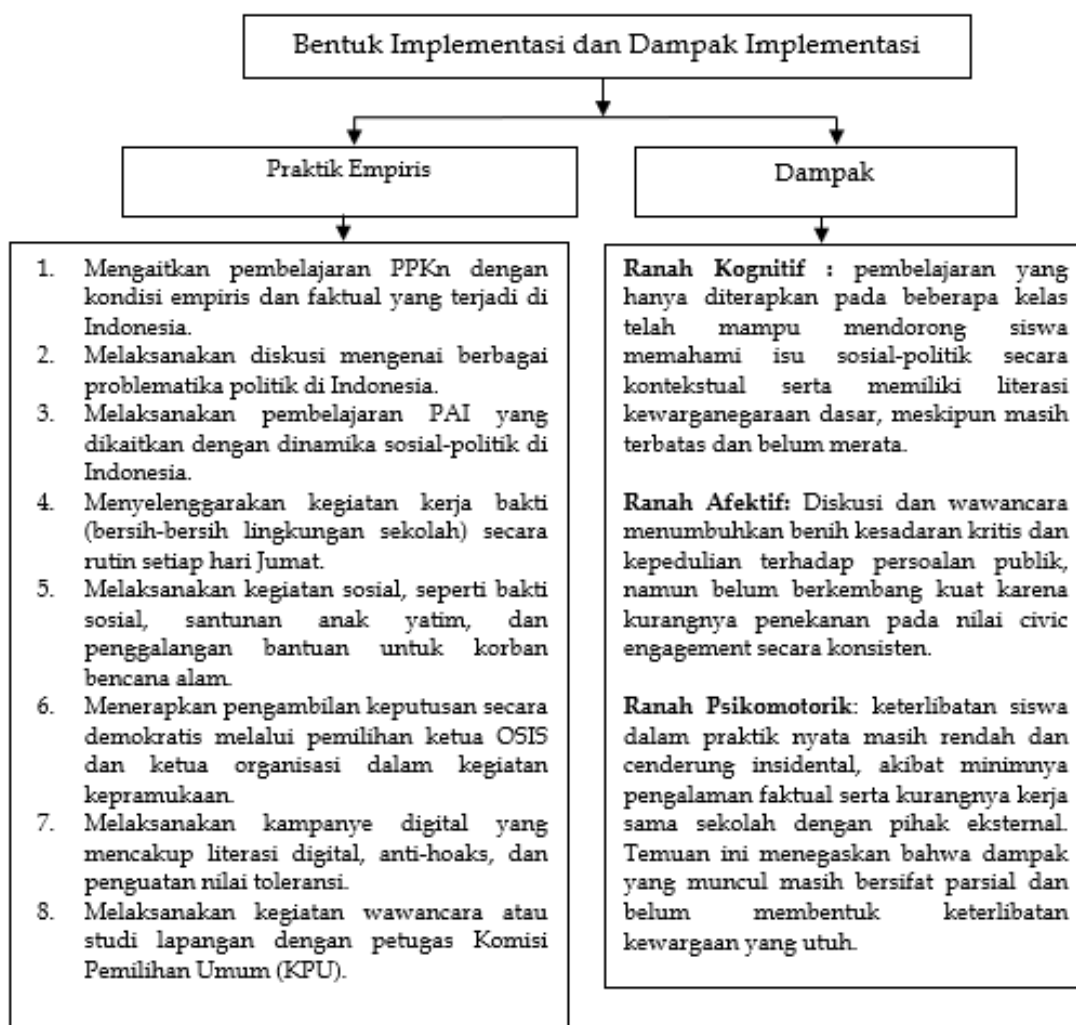
Bagian hambatan merupakan temuan paling kritis karena menjelaskan mengapa implementasi belum optimal. Hambatan seperti kebijakan yang masih implisit, ketimpangan antar kelas, dominasi pembelajaran teoritis, dan minimnya pengalaman nyata menunjukkan adanya *policy-practice gap* (Martin et al., 2024). Jika dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III, terlihat bahwa (1) Kejelasan kebijakan lemah karena masih implisit, (2) Sumber daya terbatas karena minim pengalaman nyata, (3) disposisi pelaksana tidak merata karena ketimpangan pemerolehan strategi pembelajaran antar kelas (4) Struktur belum terintegrasi karena program kurang diterapkan dalam konteks lintas mata pelajaran. Artinya, secara sistemik, implementasi belum didukung oleh struktur kebijakan yang kuat.

Dalam perspektif Robert Putnam, kondisi ini menyebabkan partisipasi siswa hanya berkembang dalam bentuk *bonding social capital* atau dalam sistem internal sekolah kurang kuat dalam mengembangkan hal tersebut (Putnam, 2025), kemudian belum mencapai *bridging social capital* (keterlibatan dengan masyarakat luas) (Gentry et al., 2025). Ini menjelaskan mengapa *civic engagement* masih bersifat terbatas.

Dalam konteks Islam, hambatan ini mencerminkan apa yang dikritik oleh Fazlur Rahman sebagai *moral verbalism*, yaitu kondisi di mana nilai kebaikan diajarkan tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan nyata (Duryat, 2021). Dengan kata lain, madrasah sudah kuat dalam *amar ma'ruf* sebagai nilai, tetapi belum optimal dalam *nabi munkar* sebagai aksi sosial. Dua faktor pendukung yang ditemukan yaitu kebijakan konseptual yang kuat dan kemudahan akses kerja sama dengan lembaga pemerintah merupakan modal strategis. Selain itu, menurut Nurcholish Madjid, madrasah memiliki keunggulan karena berbasis nilai religius yang kuat. Artinya, secara kultural dan ideologis, madrasah sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan *civic engagement* berbasis Islam. Namun, temuan menunjukkan bahwa potensi ini belum dikembangkan menjadi program sistemik yang mendorong aksi sosial nyata siswa.

Implementasi *civic engagement* di Madrasah Aliyah telah berhasil membangun fondasi kuat pada aspek nilai (*bil qalb*) dan diskursus (*bil lisan*), namun belum optimal pada aspek tindakan nyata (*bil yad*). Kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya struktur kebijakan, dominasi pembelajaran teoritis, serta terbatasnya pengalaman sosial siswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih eksplisit dan program berbasis pengalaman nyata agar siswa tidak hanya menjadi partisipan, tetapi juga agen perubahan sosial.

Bentuk Implementasi dan Dampak Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic Engagement Dan Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar



Tabel 3. Bentuk Implementasi dan Dampak Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian pada gambar menunjukkan bahwa bentuk implementasi *civic engagement* di Madrasah Aliyah telah diwujudkan melalui delapan praktik empiris yang mencakup integrasi pembelajaran kontekstual (PPKn dan PAI), diskusi isu politik, kegiatan sosial, praktik demokrasi (pemilihan OSIS), kampanye digital, hingga studi lapangan dengan KPU.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan van meter & van horn serta Edward III, praktik-praktik tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pendidikan telah

diimplementasikan pada level operasional oleh guru sebagai *street-level bureaucrats* (Larsen et al., 2025) yang menerjemahkan kurikulum ke dalam aktivitas nyata di kelas dan luar kelas. Namun demikian, temuan juga mengindikasikan bahwa implementasi ini belum berjalan optimal karena masih bersifat parsial, tidak merata antar kelas, dan belum didukung oleh penguatan struktur kebijakan serta kolaborasi eksternal yang intens.

Dari sisi dampak terhadap siswa, temuan menunjukkan pola yang selaras dengan kerangka *civic engagement* yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, siswa telah mampu memahami isu sosial-politik secara kontekstual serta memiliki literasi kewarganegaraan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep *civic literacy* (Galston, 2006), namun masih terbatas karena implementasi pembelajaran hanya terjadi pada beberapa kelas, sehingga belum merata dan belum mencapai kedalaman analisis yang kuat. Pada ranah afektif, diskusi dan wawancara terbukti menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian terhadap persoalan publik. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju *participatory citizen* dalam kerangka Westheimer & Kahne (Westheimer & Kahne, 2004), tetapi belum konsisten karena kurangnya penekanan sistematis terhadap nilai *civic engagement* (Westheimer & Kahne, 2004b). Akibatnya, sikap yang terbentuk masih berada pada level kesadaran awal dan belum sepenuhnya berkembang menjadi orientasi keadilan (*justice-oriented*) (Irfan, 2025).

Sementara itu, pada ranah psikomotorik, keterlibatan siswa dalam praktik nyata masih rendah dan cenderung insidental. Berdasarkan perspektif Verba, Schlozman & Brady (Salma & Muslim, 2025), kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prasyarat utama partisipasi, khususnya pada aspek *resources* atau pengalaman nyata, dan *recruitment* atau jejaring sosial/kerja sama eksternal. Minimnya kolaborasi dengan lembaga luar dan kurangnya pembelajaran berbasis pengalaman menyebabkan siswa belum terbiasa melakukan aksi sosial-politik secara berkelanjutan.

Secara integratif, temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *civic engagement* di madrasah telah menghasilkan dampak positif pada aspek pengetahuan dan sikap, tetapi belum bertransformasi secara optimal pada aspek tindakan. Dalam kerangka Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendidikan baru mencapai tahap *ma'rifa* (pengetahuan) dan *irādah* (kesadaran/sikap), namun belum sampai pada tahap *'amal* (tindakan nyata) secara sistematis. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk implementasi sudah variatif dan relevan, tetapi dampaknya terhadap siswa masih bersifat parsial, belum utuh, dan belum mampu membentuk keterlibatan kewargaan yang aktif, kritis, dan berkelanjutan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan menunjukkan capaian yang belum sepenuhnya optimal pada tiga aspek utama. Pertama, pada aspek bentuk kebijakan, madrasah telah memiliki kebijakan berbasis nilai yang tertuang dalam visi–misi dan praktik pembelajaran. Kebijakan ini secara konseptual telah mengarah pada penguatan *civic engagement*, namun masih bersifat normatif dan belum dirumuskan secara operasional dan sistematis. Dalam perspektif *amar ma'ruf nabi munkar*, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan baru berada pada tahap *bil qalb*, yaitu internalisasi nilai tanpa dukungan mekanisme kelembagaan yang kuat. Kedua, pada aspek proses

implementasi, pembelajaran telah mengarah pada pendekatan dialogis, kontekstual, dan berbasis isu sosial yang mendorong kesadaran kritis siswa. Hal ini menempatkan siswa pada kategori *participatory citizen* dalam kerangka *civic engagement*. Namun, implementasi belum merata, masih didominasi pendekatan teoretis, serta minim pengalaman nyata dan kolaborasi eksternal. Dalam perspektif *amar ma'ruf nabi munkar*, tahap ini berada pada *bil lisan*, yaitu partisipasi melalui diskursus dan kesadaran kritis. Ketiga, pada aspek implementasi dan dampak, berbagai praktik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap kewarganegaraan siswa. Namun, keterlibatan dalam tindakan nyata masih rendah dan bersifat insidental, sehingga belum mencapai kategori *justice-oriented citizen*. Dalam kerangka *amar ma'ruf nabi munkar*, kondisi ini menunjukkan bahwa proses belum mencapai tahap *bil yad* sebagai bentuk aksi sosial yang nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan di madrasah masih bersifat parsial, yaitu kuat pada aspek nilai dan kesadaran, tetapi lemah pada aspek tindakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih operasional dan pengembangan program berbasis pengalaman nyata agar siswa dapat berkembang menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berorientasi pada perubahan sosial

Saran

Untuk lembaga Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan diperlukan adanya penguatan implementasi *civic engagement* dengan merumuskan kebijakan yang lebih eksplisit dan operasional, serta memastikan pemerataan pelaksanaan di seluruh kelas. Pembelajaran hendaknya diarahkan pada pengalaman nyata melalui proyek sosial dan kolaborasi dengan lembaga eksternal, sehingga siswa tidak hanya memahami tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, integrasi *civic engagement* perlu diperluas ke seluruh mata pelajaran dan didukung oleh pembelajaran berbasis isu aktual agar relevan dengan kondisi sosial. Penguatan kapasitas guru juga menjadi penting agar mampu menerapkan strategi pembelajaran yang kritis dan partisipatif. Dengan langkah tersebut, diharapkan madrasah mampu mendorong terbentuknya siswa yang tidak hanya sadar secara kognitif, tetapi juga aktif dan berkelanjutan dalam partisipasi kewargaan..

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Juliani, J., Zahfa, F., Charisma, B., & Ratih, I. S. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam untuk Penguatan Karakter Peserta Didik. *Mesada: Journal of Innovation Research*, 2(2), 1432–1437. <https://doi.org/https://doi.org/10.61253/q3r4kn10>
- Ali, Y. F. (2020). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendidikan Politik (Studi di SMAN 1 Cikalong Wetan). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 158–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/pkn.v4i2.1972>
- Anam, A., & · A. A. A. (2024). *Filsafat Pendidikan Islam (Konsep Berpikir Berlandaskan Ajaran Islam)*. Academia Publication.
- Ani, M. P., & Rosidin, A. (2025). Sosialisasi Budaya Organisasi Tentang Kerjasama Organisasi Kesiswaan. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.61813/jlppm.v4i1.156>
- Argara Pasaribu, Nisa Yulianti Aritonang, & Sahata Manalu. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *Jurnal Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(6), 196–201.

- Arifin, N. (2020). Pemikiran Pendidikan John Dewey. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling*, 2(2), 204–219. <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.128>
- Asror, R. A. 's, Khusnadin, M. H., Zumaro, A., & Ahmad, I. M. (2025). Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2003>
- Bado, B. (2021). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (T. Media, Ed.). Tahta Media Group.
- Darwis, K., Halidin, A., & A, H. A. (2025). The Application of Problem-Based Learning and Think-Pair-Share Models to Enhance Students' Creative Thinking Skills at SMP Negeri 6 Watampone. *IjoASER*, 8(5), 99–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.852>
- Datunsolang, R. (2017). Konsep Pendidikan Pembebasan dalam Prespektif Islam (Studi Pemikiran Paulo Freire). *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5, 132. <http://kamus.cektkp.com/?s=tindas>,
- Doni, Hardian, D. E., & Darmojo, H. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cnedekia Kabupaten Bangka. *Prespektif Jurnal Ilmu Adiministrasi*, 7(2), 1–12.
- Fahmi, M., Alfiyah, H. Y., Prasetya, S. A., & Adienk, F. M. S. (2021). Menyandingkan Pendidikan Pembebasan Paulo Freire dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/tarbawi.v10i1.160>
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Hamdi Abdillah, LC., M. (2025). *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Widina Media Utama.
- Handoko, Y., Ramadhoni, S. R., Fitriana, F., & Tersta, F. W. (2025). Dinamika Partisipasi Guru dan Siswa dalam Proses Pengambilan Keputusan di Sekolah. *Susunan Artikel Pendidikan*, 9(3), 531–540. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/sap.v9i3.25771>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali, Ed.). Wal ashri Publishing.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1).
- Hasibuan, S., Arianto, N., & Marzuki, D. I. (2024). An Examination of Refressive Da'wah in Khaled Aboe El-Fadl's Perspective on the Implementation of Qanun Syariah in Aceh. *Wasilatun Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 8(1), 65–72.
- Imama, M. L., Pribadi, P., & Herdiman, H. (2025). Pemikiran Pendidikan Kritis dari Barat ke Timur: Telaah Teoritis dan Praksis dalam Pendidikan Indonesia. *Inovation Multidisiplin Education Journal*, 2(2), 50–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/b1g4bn19>
- Iskandar, Samsuddin, Idharudin, A. J., & Azizah, B. N. (2025). Transformasi Karakter Religius Santri Melalui Halaqah Tarbiyah: Analisis Peran Murabbi dan Internalisasi Nilai 5M Wahdah Islamiyah di Pesantren Tahfidz. *Al Qiblah*, 4(6), 697–710. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i6.2699>
- Jacoby, B., & Ehrlich, T. (2009). *Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices* (Jossey-Bass, Ed.). Enduring Questions.
- Jamil, Z. zam L., Miftahudin, U., & Hidayat, A. (2025). Value Based Strategic Management: Integrating Islamic Ethics In Educational Strategic Planning. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 458–471. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/tjmpi.v13i2.6102>

- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*. Prentice Hall Inc. https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development
- Mahur, Y., Riyanto, Y., & Roesminingsih, E. (2019). Paulo Freire: Critical, Humanist and Liberating Education (Critical Reflections on Indonesian Education). *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(8), 873. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i8.2242>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Munawir, Erindha, A. N., & Sari, D. P. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 384–390. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1108>
- Murjoko, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Islam Menuju Masyarakat Madani. *Jurnal Bina Ummat Membina Dan Membentengi Ummat*, 8(2), 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v8i2.391>
- Nabila, S., & Nadlir. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). *Journal of Education Research*, 6(2), 302–209. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i2.2336>
- Nasir, H., Prasetyono, H., & Suparman, H. (2025). Penggunaan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Upaya Peningkatan Karakter Kewirausahaan Siswa. *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 8(2), 293–333. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/herodotus.v8i2.28473>
- Nasrullah, h Y. M., Ainissyifa, H., Muliawan, D., & Noorjutstiatini, W. (2025). *Strategi Inovasi dalam Pengembangan Bahan Ajar PAU*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Peletian Kualitatif. *Wacana*, 13(2). <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Novak, D., Petrušič, T., Čule, M., Milinović, I., Kim, J., Kim, R., & Subramanian, and S. V. (2004). *Building Social Capital in University Students: A Physical Education Intervention Program*. 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1123/jpah.2024-0258>
- Novantika, V., Asriani, S., & Handayani, S. (2026). Tantangan dan Peluang Generasi Muda Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas. *Journal of Social and Education*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/j1h5fw33>
- Patria, R., Muflihah, S., Kurniawan, F., Wardani, K. D. K. A., Azmi, R., Zahra, S. F., & Titin Triana. (2025). *Komunikasi Pembelajaran*. Pradina Pustaka.
- Pebiani, M., Istiqomah, S., Susilawati, I., Safitri, D. N., Rahmatuloh, M., Wahyudi, H., & Ra'zie, Z. H. A.-. (2025). Pengabdian Kepada Masyarakat : Sosialisasi Budaya Organisasi Tentang Kerjasama Organisasi Kesiswaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(8), 297–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i8.64>
- Rachman, F., & Hosnan, M. (2025). Modernisasi Pendidikan Pesantren di Indonesia: Inovasi, Tantangan, dan Peluang Menuju Lembaga Pendidikan Islam Berdaya Saing Global. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 22–42.
- Rahmat, Z., & Ambiyar. (2025). Model Evaluasi CIPP dalam Program Sekolah: Systematic Literature Review. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(4), 911–919. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkip.v5i4.1170>

- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rizal, Z. A.-G. E.-M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Paulo Freire Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *ARTIK: Artikel Karya Mahasiswa Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/artik.v1i1.11455>
- Rizqian, D. R. (2025). Ruang Publik Deliberatif Digital: Analisis Platform Symbolic ID dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas. *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum*, 2(1), 20–29.
- Saputro, M. D., & Muslimah, K. C. (2025). Madrasah Sebagai Pusat Pendidikan Islam di Indonesia: Kontribusinya terhadap Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 140–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/jurmia.v5i2.4073>
- Seyyedi, K. (2025). Pedagogy for Freedom: Interpretation of Henry Giroux’s Critical Pedagogy. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23918/ijsses.v12i3p13>
- Shandy, & Juniantoro. (2021). *Literasi Digital dalam Tantangan Pendidikan Abad 21*. Penerbit NEM.
- Sulaiman, Yendri, O., Suhirman, L., Rachmandhani, S., & Baka, C. (2024). *Metode & Model Pembelajaran Abad 21: Teori, implementasi dan perkembangannya*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sundari, D., Anshari, K., & Al Washliyah Medan, U. (2024). *Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 6(1).
- Sunita, W. (2023). Karakteristik Guru PAI Ideal. *JKP: Jurnal Kualitas Pendidikan*, 1(1), 2023.
- Syakdiah, H. (2025). Negara dalam Islam: Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 155–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1576>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004a). Educating the “Good” Citizen: Political Choices and Pedagogical Goals. *Cambridge University Press*, 37(2), 241–247. <https://doi.org/10.1017/S1049096504004160>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004b). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/00028312041002>
- Widagdo, T. B. (2025). Pandangan Konseptual Pembelajaran Mendalam Menuju “Transformasi Pendidikan.” *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 51–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2025.004.02.05>
- Yuli Astuti Hasanah, Putri Lailul Khitmah, Muhammad Choirur Roziqin, Atik Nurul Azizah, & Mohammad Zaki Firmansah. (2025). Student Participation in Social Action as an Implementation of Civic Education and Student Involvement in Social Activities and Public Policy Advocacy. *Civic Education*, 5(2).